



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2021
SATKER PUSKEU POLRI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Polri yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima kepolisian serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dipilihnya Satker Pusat Keuangan Polri sebagai zona integritas menuju WBKWBK Tahun 2021 karena telah memenuhi beberapa syarat, antara lain: memiliki peran dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis dan dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik.

Kegiatan ini merupakan tonggak awal perubahan yang ingin dibangun di lingkungan Puskeu Polri. Setelah kegiatan ini diharapkan seluruh staf untuk saling mengingatkan, bantu membantu, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Employee engagement antara bidang pada Satker Puskeu Polri diharapkan bekerja secara optimal, buat inovasi yang baik untuk kemajuan organisasi sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal.

Untuk

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program Zona Integritas Satker Puskeu Polri yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan perlu dilakukan analisa dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan Program Zona Integritas Polri serta pencapaian dari program yang telah ditetapkan sesuai dengan Road Map Polri Tahun 2020 – 2024.

Satker Puskeu Polri melaksanakan 7 (tujuh) Program dari 9 (Sembilan) Program Reformasi Birokrasi Polri yaitu Program Penataan & Penguatan Organisasi, Program Penataan Tata Laksana, Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Program Manajemen Perubahan, Program Penguatan Pengawasan, Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Program Monitoring & Evaluasi. Ketujuh program tersebut merupakan komponen pengungkit yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

2. Dasar

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;
- b. Surat Kapolri Nomor: B/6111/X/REN.2.3./2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal pemberitahuan pelaksanaan penilaian ZI menuju WBK Satker tingkat Mabes Polri oleh TPI;
- c. surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor : Sprin/38/I/RE.2.3./2021 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukkan personel Puskeu Polri yang mengikuti pelaksanaan persiapan penilaian ZI menuju WBK T.A. 2021 dengan materi Budaya Kerja dan Pola Pikir di Hotel Cosmo Amaroossa Jl. Pangeran Antasari No. 9 Cilandak Jakarta Selatan.

3. Maksud

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada pimpinan tentang evaluasi pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK T.A. 2021 dengan materi Budaya Kerja dan Pola Pikir pada Satker Puskeu Polri.

b. Tujuan

Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam evaluasi pelaksanaan Zona Integritas di Satker Puskeu Polri serta untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi hasil evaluasi pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK T.A. 2021 dengan materi Budaya Kerja dan Pola Pikir pada Satker Puskeu Polri.

5. Tata Urut

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PROGRAM ZONA INTEGRITAS PUSKEU POLRI
BAB III	: TARGET
BAB IV	: HASIL YANG DICAPAI
BAB V	: HAMBATAN DAN TINDAK LANJUT
BAB VI	: PENUTUP

BAB II PROGRAM ZONA INTEGRITAS PUSKEU POLRI

6. Program Manajemen Perubahan

a. Rencana Kegiatan

- 1) Pembentukan Tim Pokja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
- 2) Penyusunan Mekanisme dan prosedur pembentukan Tim Pokja;
- 3) Penyusunan Dokumen dan target prioritas Rencana Aksi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;

b. Rencana Anggaran

Besaran anggaran yang diperlukan untuk kegiatan di atas tahun 2021 sudah teranggarkan dalam DIPA Satker Puskeu Polri T.A. 2021.

7. Program Penataan Tata Laksana

a. Rencana Kegiatan

Menyusun SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi Satker Puskeu Polri.

b. Rencana Anggaran

Besaran anggaran yang diperlukan untuk menyusun SOP tahun 2021 sudah teranggarkan dalam DIPA Satker Puskeu Polri T.A. 2021.

8. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

a. Rencana Kegiatan

- 1) memberikan input tentang informasi faktor jabatan pada Satker Puskeu Polri;
- 2) melakukan penilaian kinerja individu dengan SMK dan PPK;
- 3) mendukung info data pegawai Satker Puskeu Polri;
- 4) memberikan masukan dalam susun kurikulum manajemen strategi dan keuangan pemerintah di lingkungan Polri.

b. Rencana

b. Rencana Anggaran

Besaran anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di atas tahun 2021 sudah teranggarkan dalam DIPA Satker Puskeu Polri T.A. 2021.

9. Program Manajemen Perubahan

a. Rencana Kegiatan

- 1) Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai pada Satker Puskeu Polri dalam membangun Zona Integritas menuju WBKWBMM;
- 2) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Satker Puskeu Polri dalam membangun Zona Integritas menuju WBKWBMM; dan
- 3) Merangsang pola pikir mandiri dan kreatif seluruh jajaran pimpinan dan pegawai pada Satker Puskeu Polri , sehingga dapat keluar dari kebiasaan-kebiasan birokrasi yang terkesan berbelit-belit selama ini;
- 4) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

b. Rencana Anggaran

Besaran anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di atas sudah teranggarkan dalam DIPA Puskeu Polri T.A. 2021

10. Program Penguatan Pengawasan

a. Rencana Kegiatan

- 1) Menyusun Laporan Keuangan Polri T.A. 2020 untuk mempertahankan opini BPK WTP;
- 2) Melakukan asistensi evaluasi ke Satker jajaran tentang pelaksanaan anggaran serta persiapan penyusunan laporan keuangan Polri T.A. 2021.

b. Rencana

b. Rencana Anggaran

Besaran anggaran untuk penyusunan laporan keuangan Polri T.A. 2020 dan asistensi evaluasi ke Satker jajaran pelaksanaan anggaran serta persiapan penyusunan laporan keuangan Polri T.A. 2021 sudah teranggarkan dalam DIPA Satker Puskeu Polri T.A. 2021.

11. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Rencana Kegiatan

Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satker

Puskeu Polri tahun 2021.

b. Rencana Anggaran

Besaran anggaran untuk menyusun LAKIP tahun 2021 sudah teranggarkan dalam DIPA Satker Puskeu Polri T.A. 2021.

12. Program Monitoring dan Evaluasi

a. Rencana Kegiatan

- 1) menyusun laporan pelaksanaan evaluasi semesteran tahun 2021 Satker Puskeu Polri;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan evaluasi tahunan tahun 2021 Satker Puskeu Polri.

b. Rencana Anggaran

Besaran anggaran untuk penyusunan laporan evaluasi telah dianggarkan dalam DIPA Satker Puskeu Polri T.A. 2021.

BAB III TARGET

13. Program Manajemen Perubahan:

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja;
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan.

14. Program Penataan Tata Laksana:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan;
- c. Meningkatnya kinerja.

15. Program Penataan Sistem Manajemen SDM:

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur;
- d. Meingkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur;
- e. Meingkatkan profesionalisme SDM aparatur.

16. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

- a. Meningkatnya kinerja instansi;
- b. Meningkatnya akuntabilitas.

17. Program Penguatan Pengawasan:

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan anggaran;
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran;
- c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing -masing instansi pemerintah;
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing masing instansi pemerintah.

BAB IV
CAPAIAN

CAPAIAN PEMENUHAN INDIKATOR DAN DOKUMEN PEMBANGUNAN ZI s.d. APRIL 2021						
	PENILAIAN		INDIKATOR	PERTANYAAN/ PERNYATAAN	DOKUMEN	
					LKE	PUSKEU
I	PENGUNGKIT	60%	23	81	80	80
	1. Manajemen Perubahan	8%	4	12	12	12
	2. Penataan Tata Laksana	7%	3	9	9	9
	3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	6	18	18	18
	4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	2	11	11	11
	5. Penguatan Pengawasan	15%	5	19	19	19
	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	3	12	11	11
II	HASIL	40%	3	3	3	3
	1. Aparatur Polri yang bersih dan bebas KKN	20%	2	2	2	2
	2. Kualitas Pelayanan Publik	20%	1	1	1	1
	TOTAL		26	84	83	83

BAB V...

BAB V HAMBATAN DAN TINDAK LANJUT

18. Hambatan

- a. Terdapat program Zona Integritas yang belum dilaksanakan oleh satker Puskeu Polri untuk tahun 2021 yaitu program penguatan pengawasan pada indikator pengaduan masyarakat, karena Puskeu Polri tidak berhubungan langsung dengan penanganan pengaduan masyarakat.
- b. Pelaksanaan evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung.

19. Tindak Lanjut

- a. Mengedarkan surat edaran tentang mewujudkan ZI menuju WBK di lingkungan Puskeu Polri dan Buku Panduan Tata Cara Pembanguna ZI menuju WBK;
- b. Terselenggaranya sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi serta terpasangnya poster larangan gratifikasi;
- c. Terbentuknya unit pengendali Gratifikasi;
- d. Terpantaunya seluruh kegiatan personel Puskeu dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat;
- e. Diterbitkannya surat edaran Puskeu terkait pengendalian Gratifikasi;
- f. Kapuskeu beserta seluruh PJU dan pelaksana tugas di masing-masing bidang melakukan Ikrar dan penandatanganan Pakta Integritas;
- g. Terbentuknya SOP yang sesuai dengan proses bisnis Puskeu Polri;
- h. Terevaluasinya SOP disertai dengan tindak lanjut berupa perbaikan maupun penambahan SOP;
- i. Terwujudnya operasionalisasi Manajaemen SDM yang menggunakan Teknologi Informasi dan juga melakukan Inovasi;
- j. Terlaksananya pelayanan terhadap satker dengan menggunakan teknologi informasi dan terdapat inovasi;
- k. Terwujudnya laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.

BAB VI
PENUTUP

Demikian laporan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2021 Satker Puskeu Polri disusun sebagai bahan masukan kepada pimpinan untuk menetapkan arah dan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta,

April 2021



KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI